

Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Sumut KCP Syariah Multatuli

M Ridho Effendy¹, Nurul Jannah²

Fakultas ekonomi dan bisnis islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
ridhoeffendy5@gmail.com, jnurul1992@gmail.com

ABSTRACT

Good Corporate Governance is a way of corporate governance that aims to make the company run well. This study intends to let us know how to apply the principles of good corporate governance at Bank Sumut kcp syariah Multatuli, a regionally owned Islamic bank which is a branch of thea North Sumatran bank. This research uses the principle of a qualitative approach with a semi-structured interview technique, to determine the sources by using a purposive sampling method. The data analysis technique used in this research is data reduction in data presentation and conclusion drawing. The results of the study show the imp-lementation of Good Corporate Governance through the principle of Tariffs, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairnes. At Bank Sumut Kcp syariah Multatuli this is already good and in accordance with the principles of Good Corporate Governance.

Keywords : *Good Corporate Governance, TARIF; Journal Al-Kharaj.*

ABSTRAK

Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan cara tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk membuat perusahaan berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Bank Sumut kcp syariah Multatuli, sebuah bank syariah milik daerah yang merupakan cabang dari bank Sumatera Utara.a Penelitian ini menggunakan prinsip pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara aasemi-struktur, atau penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data dalam penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan Good Corporate Governance melalui prinsip Tarif, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran. Di Bank Sumut Kcp syariah Multatuli ini sudah baik dan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance.

Kata kunci : *Good Corporate Governance, TARIF; Jurnal Al-Kharaj.*

PENDAHULUAN

Di dalam dunia perbankan di indonesia banyak bank yang berkembang, banyak bank baru yang muncul dan mereka saling bersaing satu sama lain untuk memajukan ekonomi

khhususnya di dunia perbankan, macam-macam bank di antaranya seperti bank konvensional pemerintah, bank pembangunan daerah, bank swasta, dan juga ada kantor cabang bank asing, dan untuk bank syariahnya itu terdiri dari bank syariah pemerintah, bank syariah swasta, unit usaha syariah, dan juga ada bank perkreditan rakyat.

Pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (ojk.go.id).

Bank Sumut merupakan bank pembangunan daerah yang berkedudukan di provinsi Sumatera Utara yang berdiri pada tanggal 4 November 1961 didirikan oleh pemprov Sumut yang pusatnya itu ada di Kota Medan, dan juga Bank Sumut membuka unit usaha syariahnya yang bertujuan untuk membantu bank Sumut pusat dalam mengembangkan bank Sumut di provinsi Sumatera Utara, gunanya untuk seluruh transaksi yang ada di bank Sumut syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam atau sesuai syariat Islam, salah satunya adalah Bank Sumut KCP Syariah Multatuli ini yang merupakan cabang dari bank Sumut.

Bank Sumut Unit Syariah merupakan salah satu unit bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan izin dari BI NO.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004. Pembukaan Kantor Cabang Syariah Medan dan Padang Sidempuan, No.5/142/PRZ/Mdn tanggal 28 Oktober 2005, diikuti dengan dibukanya Cabang Syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT. Bank Sumut.

Menurut website resmi Bank Sumut, Peran Bank Sumut sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang Perbankan, PT. Bank Sumut berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, berperan sebagai Pemegang Kas Daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum seperti dimaksudkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Memberikan Pelayanan TERBAIK Terpercaya, Enerjik, Ramah, Bersahabat, Aman, Integritas tinggi, Komitmen¹.

Di zaman sekarang banyak bank yang sudah mampu melihat peluang dengan menggunakan tenaga kerja yang profesional di bidang perbankan, tenaga kerja yang

¹ <https://www.banksumut.co.id/budaya-perusahaan/>

profesional membawa pengaruh positif terhadap perusahaan tersebut, pengaruh positif ini berupa tingkat produktifitas perusahaan yang meningkat secara baik.

Di dalam meningkatkan produktifitas suatu perusahaan perlu di terapkan sistem *Good Corporate Governance* oleh perusahaan, pada dasarnya merupakan suatu sistem dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti stakeholder, dalam arti sempit adalah mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. *Good Corporate Governance* di maksudkan untuk mengatur hubungan dan mencegah terjadinya kesalahan yang signifikan dalam strategi perusahaan serta tanggung jawab kepada stake holder.(Zarkasyi, 2008,p.36)².

Oleh sebab itu disini penulis akan membahas mengenai bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Kcp Multatuli, melalui penerapan prinsip TARIF , yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairness*. Sehingga bank Sumut Kcp Syariah Multatuli mampu mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan juga mampu bersaing dengan kompetitor dengan maksimal, dan menjadi bank yang bermutu dan berkualitas tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Sumut Kcp Syariah Multatuli³.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Objek penelitian yaitu penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Sumut Kcp Syariah Multatuli dengan subjek penelitian yaitu salah satu narasumber dari karyawan nya Bank Sumut Syariah Kcp Multatuli.

Penentuan narasumber Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel Sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling

² Zarkasyi, W. (2008), *Good Corporate Governance:pada badan usaha manufaktur, perbankan, dan jasa keuangan lainnya*. Bandung:Alfabeta.

³ Terius Yoel Yohanmar dan Ratih Indriyani. *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Sumber Jaya Gemilang*,Agora Vol.4, No.2,(2016).

tahu tentang apa yang diharapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang di teliti (Sugiyono, 2015, p. 300)⁴.

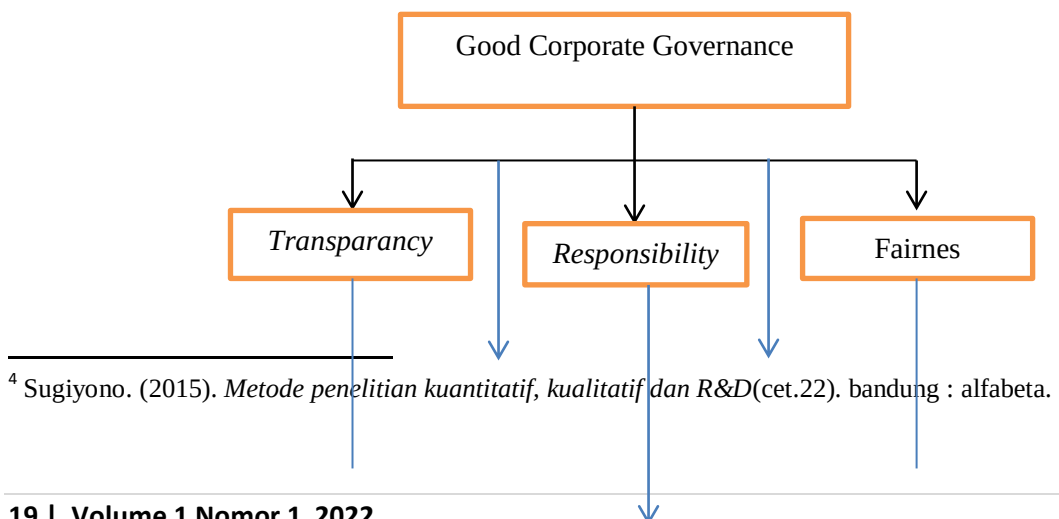
Narasumber yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah karyawan dari bank Sumut Syariah Kcp Multatuli. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dimana peneliti mewawancarai karyawan dari bank sumut syariah kcp multatuli terkait penerapan Good Corporate Governance di Bank Sumut Syariah Kcp Multatuli karena beliau di anggap faham dan berwewenang menjawab beberapa pertanyaan dari peneliti, Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data penyajian data dan conclusion drawing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Hasil penelitian

Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu karyawan dari Bank tersebut yang bernama Rina Widya Ningsih dimana pertanyaan nya menyangkut tentang Good Corporate Governance di bank tersebut melalui penerapan prinsip TARIF, yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Fairnes*.

Gambar 1 kerangka kerja penelitian Bank Sumut Kcp Syariah Multatuli



⁴ Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*(cet.22). bandung : alfabeta.

Accountability

Independency

Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada
Bank Sumut Kcp Syariah Multatuli

Tabel 1 Daftar pertanyaan beserta jawabannya

	Transparancy
T	Apakah informasi mengenai perusahaan (laporan keuangan, kegiatan, kebijakan – kebijakan dan lain lain) disampaikan kepada pihak eksternal perusahaan (pemerintah, konsultan, konsumen, kreditor)?
J	Laporan keuangan nya ada di sampaikan di rapat umum pemegang saham yang di lakukan pertahun di bank Sumut Syariah Kcp Multatuli.
T	Apakah perusahaan memiliki kebijakan perusahaan? Bagaimana cara penentuan kebijakan nya?
J	kebijakan perusahaan di Bank Sumut Syariah Kcp Multatuli pasti ada untuk penerapannya itu bank membuat serikat pekerja untuk menampung aspirasi dari seluruh karyawan.
	Accountability
T	Apakah perusahaan memiliki sistem pengendalian internal dalam pengelolaan perusahaan?
J	untuk sistem pengendalian internal bank Sumut Syariah Kcp Multatuli memiliki sistem pengendalian internal nya yaitu SDM mulai dari pimpinan cabang, pimpinan operasional, back office, Account Officer, Funding sales officer, teller, customer service.
	Responsibility
T	Apakah selalu di adakan evaluasi terhadap kinerja semua jajaran perusahaan ?
J	Untuk evaluasi ada di lakukan setiap 6 bulan sekali untuk menilai kinerja para karyawan apakah sudah baik atau masih ada kekurangan.
	Independency
T	Apakah perusahaan memiliki audit eksternal ?
J	Di bank Sumut Syariah Kcp Multatuli untuk audit eksternalnya itu ada yang terdiri dari OJK (otoritas jasa keuangan), BPK (badan pemeriksaan keuangan), dan akuntan publik.
	Fairnes
T	Apakah perusahaan memperhatikan kesejahteraan karyawan ? kalau ada, Bagaimana bentuk perhatian kesejahteraan karyawan tersebut?
J	Tentunya Bank Sumut Syariah Kcp multatuli ini memperhatikan kesejahteraan karyawannya, yaitu dengan bentuk memberikan bonus

	kepada karyawan dan juga di berikan cuti untuk pegawai.
--	---

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas, Bank Sumut Syariah Kcp Multatuli ini sudah melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik di buktikan dengan jawaban di bagian *Transparency* perusahaan ini dalam pelaporan Laporan keuangan nya ada di sampaikan di rapat umum pemegang saham yang di lakukan pertahun, dan perusahaan ini juga memiliki kebijakan perusahaan untuk penerapannya itu bank membuat serikat pekerja untuk menampung aspirasi dari seluruh karyawan.

Dan pada bagian *Accountability* untuk sistem pengendalian internal bank Sumut Syariah Kcp Multatulu memiliki sistem pengendalian internal nya yaitu SDM mulai dari pimpinan cabang, pimpinan operasional, back office, Account Officer, Funding sales officer, teller, customer service. Lalu pada bagian *Responsibility*, Untuk evaluasi ada di lakukan setiap 6 bulan sekali untuk menilai kinerja para karyawan apakah sudah baik atau masih ada kekurangan.

Dan untuk bagian *Independency*, Di bank Sumut Syariah Kcp Multatuli untuk audit eksternalnya itu ada yang terdiri dari OJK (otoritas jasa keuangan), BPK (badan pemeriksaan keuangan), dan akuntan publik. Dan untuk *Fairnes*, Tentunya Bank Sumut Syariah Kcp multatuli ini memperhatikan kesejahteraan karyawannya, yaitu dengan bentuk memberikan bonus kepada karyawan dan juga di berikan cuti untuk pegawai.

1.2. Pembahasan

Good governance sesungguhnya muncul dalam konteks globalisasi, khususnya setelah runtuhnya komunisme atau akhir dari perang dingin. *Good governance* secara sistematis didesain untuk merespon korupsi, krisis ekonomi dan finansial, yang dianggap sebagai permasalahan di negara-negara miskin dan berkembang. *World Bank* merupakan lembaga yang pertama kali memperkenalkan konsep “*public sector management programs*” dalam rangka melaksanakan tata pemerintahan yang lebih baik, khususnya dalam konteks persyaratan bantuan pembangunan, yang dikenal dengan *Structural Adjustment* (World Bank,1989)⁵.

Meskipun telah disuarakan lama di negara belahan dunia yang lain, tetapi masuk ke Indonesia baru sekitar tahun 1998, yakni setelah reformasi yang telah membuka ketertutupan negara oleh segala informasi dari luar negeri, yang

⁵ World Bank. 1989. *Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth*. Washington: World Bank.1992a. *Governance and Development*. Washington, DC: World Bank.

didukung oleh hasil interaksi pemerintah Indonesia dengan negara dan lembaga pemberi bantuan (donor)⁶.

Soepomo (2000:143)

menjelaskan istilah good governance adalah pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel dengan terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil. Selanjutnya dijelaskan untuk mewujudkannya jalan yang ditempuh adalah memberantas KKN dan memperbaiki kinerja pemerintah⁷.

Menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006), lima prinsip GCG adalah sebagai berikut⁸:

1. Transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Akuntabilitas

Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Responsibilitas

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangundangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

4. Independensi

Untuk memperlancar pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen dengan keseimbangan keuangan. Dalam

⁶ Wijaya, emiliana sri pudjiarti, aris toening winarni, *Buku Ajar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (Good Governance)*, penerbit pustaka magister, demak jawa tengah, 2018, hal.2.

⁷ Soepomo Projojono, 2000, *Definisi Akuntan sektor Publik Dalam Upaya Penciptaan Good Government Governance*, Kongres Nasional Akuntansi IV, Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia.

⁸ KNKG. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. 2006. Komite Nasional Kebijakan Governance

keseimbangan kekuatan tersebut, tidak ada organ perusahaan yang mendominasi satu sama lain dan tidak dapat diintervensi dari pihak lain.

5. Fairnes (Kesetaraan dan Kewajaran)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan⁹.

Peneliti melakukan wawancara kepada salah satu karyawan dari Bank tersebut dimana pertanyaan nya menyangkut tentang Good Corporate Governance di bank tersebut melalui penerapan prinsip TARIF, yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairnes*.

Berikut daftar pertanyaan yang peneliti ajukan :

1. *Transparacy*

Q: Apakah informasi mengenai perusahaan (laporan keuangan, kegiatan, kebijakan – kebijakan dan lain lain) disampaikan kepada pihak eksternal perusahaan (pemerintah, konsultan, konsumen, kreditor)?

A: Laporan keuangan nya ada di sampaikan di rapat umum pemegang saham yang di lakukan pertahun di bank Sumut Syariah Kcp Multatuli.

Q : Apakah perusahaan memiliki kebijakan perusahaan? Bagaimana cara penentuan kebijakan nya?

A: kebijakan perusahaan di Bank Sumut Syariah Kcp Multatuli pasti ada untuk penerapannya itu bank membuat serikat pekerja untuk menampung aspirasi dari seluruh karyawan.

2. *Accountability*

Q : Apakah perusahaan memiliki sistem pengendalian internal dalam pengelolaan perusahaan?

A : untuk sistem pengendalian internal bank Sumut Syariah Kcp Multatulu memiliki sistem pengendalian internal nya yaitu SDM mulai dari pimpinan cabang, pimpinan operasional, back office, Account Officer, Funding sales officer, teller, customer service.

3. *Responsibility*

Q : Apakah selalu di adakan evaluasi terhadap kinerja semua jajaran perusahaan ?

A : Untuk evaluasi ada di lakukan setiap 6 bulan sekali untuk menilai kinerja para karyawan apakah sudah baik atau masih ada kekurangan.

4. *Independency*

Q : Apakah perusahaan memiliki audit eksternal ?

⁹ Terius Yoel Yohanmar dan Ratih Indriyani. *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Sumber Jaya Gemilang*, AGORA Vol.4, No.2,(2016).

A: Di bank Sumut Syariah Kcp Multatuli untuk audit eksternalnya itu ada yang terdiri dari OJK (otoritas jasa keuangan), BPK (badan pemeriksaan keuangan), dan akuntan publik.

5. Fairnes

Q : Apakah perusahaan memperhatikan kesejahteraan karyawan ? kalau ada, Bagaimana bentuk perhatian kesejahteraan karyawan tersebut?

A : Tentunya Bank Sumut Syariah Kcp multatuli ini memperhatikan kesejahteraan karyawannya, yaitu dengan bentuk memberikan bonus kepada karyawan dan juga di berikan cuti untuk pegawai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Di dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Syariah Kcp Multatuli, melalui penerapan prinsip TARIF, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency*, dan *Fairnes*. Sehingga bank Sumut Syariah Kcp Multatuli mampu mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan juga mampu bersaing dengan kompetitor dengan maksimal, dan menjadi bank yang bermutu dan berkualitas tinggi.

Berdasarkan hasil dari wawancara dari karyawan Bank Sumut Syariah Kcp Multatuli ini sudah melaksanakan *Good Corporate Governance* dengan baik di buktikan dengan jawaban di bagian *Transparency* perusahaan ini dalam pelaporan Laporan keuangan nya ada di sampaikan di rapat umum pemegang saham yang di lakukan pertahun, dan perusahaan ini juga memiliki kebijakan perusahaan untuk penerapannya itu bank membuat serikat pekerja untuk menampung aspirasi dari seluruh karyawan.

Dan pada bagian *Accountability* untuk sistem pengendalian internal bank Sumut Syariah Kcp Multatuli memiliki sistem pengendalian internal nya yaitu SDM mulai dari pimpinan cabang, pimpinan operasional, back office, Account Officer, Funding sales officer, teller, customer service. Lalu pada bagian *Responsibility*, Untuk evaluasi ada di lakukan setiap 6 bulan sekali untuk menilai kinerja para karyawan apakah sudah baik atau masih ada kekurangan.

Dan untuk bagian *Independency*, Di bank Sumut Syariah Kcp Multatuli untuk audit eksternalnya itu ada yang terdiri dari OJK (otoritas jasa keuangan), BPK (badan pemeriksaan keuangan), dan akuntan publik. Dan untuk *Fairnes*, Tentunya Bank Sumut Syariah Kcp multatuli ini memperhatikan kesejahteraan karyawannya, yaitu dengan bentuk memberikan bonus kepada karyawan dan juga di berikan cuti untuk pegawai.

Saran, lebih di tingkatkan lagi penerapan *Good Corporate Governance* di bank Sumut Kcp Syariah Multatuli ini dan juga lebih di tingkatkan lagi disiplin dari setiap pegawai guna kemajuan Bank Sumut Kcp Syariah Multatuli ini.

REFERENSI

Zarkasyi, W. (2008). *Good Corporate Governance: pada badan usaha manufaktur, perbankan, dan jasa keuangan lainnya*. Bandung: Alfabeta.

Terius Yoel Yohanmar dan Ratih Indriyani. . *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada PT. Sumber Jaya Gemilang, AGORA* Vol.4, No.2,(2016).

Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*(cet.22). bandung alfabeta.

World Bank. 1989. *Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth*. Washington: World Bank.1992a. *Governance and Development*. Washington, DC: World Bank.

Wijaya,emiliana sri pudjiarti,aris toening winarni, *Buku Ajar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (GOOD GOVERNANCE)*, pustaka magister : demak jawa tengah,2018.

Soepomo Projojono, 2000, *Definisi Akuntan sektor Publik Dalam Upaya Penciptaan Good Government Governance, Kongres Nasional Akuntansi IV*, Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia.

KNKG. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. 2006. Komite Nasional Kebijakan Governance
<https://www.banksumut.co.id/budaya-perusahaan/>